JURNAL RISET PENDIDIKAN INDONESIA
J R P I

Volume 6, Nomor 3, Oktober 2026, Halaman 12~20, ISSN: 2809-980X

Dari Kolom Komentar hingga Ruang Kelas: Pendidikan Multikultural di Tengah Polarisasi Media Sosial

Zakia Khoshi Oase[1*], Nurliana[2], Nurul Mubin[3]

[1..2,3] Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an

Artikel Info

Riwayat Artikel:

Diterima 16-08-2026
Diperbaiki 05-09-2026
Diterima 30-09-2026

Kata Kunci:

Pendidikan Multikultural
Polarisasi Media Sosial
Literasi Digital
Moderasi Beragama

ABSTRAK

Media sosial telah menjadi ruang sosial utama bagi Generasi Z, termasuk peserta didik di sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi. Di satu sisi, ia memperluas akses informasi dan jejaring lintas budaya. Di sisi lain, ia menjadi lahan subur bagi polarisasi yang digerakkan oleh algoritma, echo chamber, filter bubble, dan hoaks, serta terwujud dalam ujaran kebencian, stereotip SARA, dan perundungan siber. Artikel ini mengkaji bagaimana pendidikan multikultural dapat berperan sebagai penyeimbang di tengah situasi tersebut. Kajian dilakukan melalui studi pustaka dengan kerangka lima dimensi pendidikan multikultural James A. Banks. Pembahasan mencakup konsep pendidikan multikultural, penyebab dan bentuk polarisasi digital, dampaknya terhadap sikap toleransi dan interaksi kelas, peran institusi pendidikan serta guru dan dosen, dan tantangan implementasinya. Artikel ini berargumen bahwa pendidikan multikultural perlu diperluas dari sekadar pengenalan budaya menjadi pendidikan yang secara eksplisit membekali peserta didik dengan literasi digital, berpikir kritis, dan kemampuan berdialog lintas kelompok. Bagi pendidikan agama Islam, upaya ini sejalan dengan prinsip tabayyun, wasathiyah, dan rahmatan lil 'alamin. Rekomendasi praktis dan arah penelitian lanjutan dirumuskan pada bagian akhir.

Ini adalah artikel open access di bawah lisensi CC BY-SA.

Penulis Koresponden:

Indana Aulia
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia.
Email: Khoshioase@unsiq.ac.id

1. INTRODUCTION

Ruang kelas pada dasarnya adalah ruang pertemuan berbagai latar belakang: suku, agama, budaya, status sosial, dan cara pandang. Namun sebelum peserta didik melangkah masuk ke ruang itu, mereka sering sudah "diajari" lebih dulu oleh ruang lain, yaitu kolom komentar. Di sanalah banyak anak muda pertama kali membentuk kesan tentang kelompok yang berbeda dari mereka, biasanya lewat potongan video, tangkapan layar, dan perdebatan yang berlangsung dalam hitungan detik.

Besarnya paparan tersebut tampak dari data penetrasi internet. Survei APJII mencatat penetrasi internet Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 79,5 persen dari populasi, dengan

kelompok usia muda sebagai kontributor besar (APJII, 2024). Bagi Generasi Z, media sosial bukan lagi sekadar hiburan, tetapi juga sumber informasi, ruang membangun identitas, dan arena pergaulan.

Persoalannya, ruang digital tidak netral. Platform dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, dan konten yang memancing emosi cenderung lebih cepat menyebar. Vosoughi, Roy, dan Aral menemukan bahwa berita palsu di Twitter menyebar lebih jauh, lebih cepat, dan lebih luas daripada berita benar (Voshougi, 2018). Kondisi ini berpotensi memperdalam prasangka antarkelompok di masyarakat yang sangat majemuk seperti Indonesia.

Dalam konteks inilah pendidikan multikultural menemukan urgensi barunya. Selama ini pendidikan multikultural sering dipahami sebatas pengenalan keragaman budaya, misalnya tarian daerah, pakaian adat, atau perayaan hari besar. Padahal tantangan hari ini menuntut lebih dari itu, yakni membekali peserta didik untuk hidup damai dengan perbedaan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Bagi mahasiswa dan calon pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI), isu ini memiliki makna tambahan. PAI tidak hanya mengajarkan ritual dan doktrin, tetapi juga membentuk akhlak sosial dan sikap moderat dalam beragama. Artikel ini karenanya menautkan kerangka pendidikan multikultural dengan nilai-nilai Islam tentang keragaman, keadilan, dan verifikasi informasi.

Tujuan artikel ini adalah (1) menjelaskan konsep pendidikan multikultural; (2) menguraikan polarisasi media sosial beserta penyebab dan bentuknya; (3) menganalisis dampaknya terhadap peserta didik; (4) merumuskan peran pendidikan multikultural serta peran guru dan dosen; (5) mengidentifikasi tantangan; dan (6) menyusun rekomendasi strategis dan arah penelitian berikutnya.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan kajian adalah menganalisis dan mensintesis konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu mengenai pendidikan multikultural dan polarisasi media sosial, bukan mengukur fenomena di lapangan.

Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan. Sumber utama meliputi karya tentang pendidikan multikultural (Banks, Gay, Tilaar), teori kontak antarkelompok (Allport; Pettigrew dan Tropp), kajian polarisasi dan ekosistem informasi digital (Sunstein, Pariser, Wardle dan Derakhshan, Vosoughi dkk., Bail dkk.), serta literasi digital dan pengelolaan diskusi kontroversial di kelas (Wineburg dan McGrew; Hess dan McAvoy). Nilai-nilai keislaman dirujuk dari Al-Qur'an dan dokumen moderasi beragama Kementerian Agama.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data untuk memfokuskan informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Lima dimensi pendidikan multikultural James A. Banks digunakan sebagai lensa analisis untuk memetakan strategi pendidikan terhadap persoalan polarisasi digital. Keterbatasan kajian ini adalah tidak adanya data primer, sehingga temuan bersifat konseptual dan perlu diuji secara empiris pada penelitian lanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Pendidikan Multikultural

a. Pengertian

Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mengelola keragaman budaya, agama, etnis, bahasa, gender, dan status sosial sebagai sumber daya belajar. Banks menggambarkannya sebagai gagasan, gerakan pembaruan pendidikan, sekaligus proses yang bertujuan mengubah struktur institusi pendidikan agar peserta didik dari beragam kelompok memiliki kesempatan belajar yang setara (Bank, 2008). Di Indonesia, Tilaar menekankan bahwa pendidikan multikultural berakar pada realitas bangsa yang majemuk dan bertujuan membangun kesadaran untuk hidup bersama dalam perbedaan (Tilaar, 2004). Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan dimensi berkebinekaan global dalam Profil Pelajar Pancasila menjadi payung normatifnya dalam kebijakan pendidikan nasional.

b. Tujuan

Tujuan pendidikan multikultural dapat dirangkum dalam empat hal. Pertama, kesetaraan kesempatan belajar agar tidak ada peserta didik yang dirugikan karena identitas kelompoknya. Kedua, pengurangan prasangka dan diskriminasi dengan mengubah sikap negatif terhadap kelompok lain. Ketiga, pengembangan kompetensi lintas budaya, yaitu kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang yang berbeda latar. Keempat, penguatan kohesi sosial dan kewargaan demokratis sehingga peserta didik mampu berpartisipasi secara aktif dan adil dalam masyarakat plural.

c. Lima dimensi James A. Banks

Kerangka yang paling banyak dirujuk adalah lima dimensi pendidikan multikultural dari Banks (Bank, 2015). Kelima dimensi tersebut adalah sebagai berikut.

1) **Integrasi isi (content integration).** Guru memasukkan contoh, data, dan perspektif dari beragam budaya ke dalam mata pelajaran. Dalam PAI, misalnya, pembahasan sejarah Piagam Madinah atau praktik toleransi dalam peradaban Islam.
2) **Proses konstruksi pengetahuan (knowledge construction).** Peserta didik diajak memahami bahwa pengetahuan tidak bebas dari sudut pandang penyusunnya. Dimensi ini sangat relevan dengan literasi media karena setiap konten digital dibuat dari posisi dan kepentingan tertentu.
3) **Pengurangan prasangka (prejudice reduction).** Pembelajaran dirancang untuk membentuk sikap positif terhadap kelompok lain, misalnya melalui kerja kelompok lintas identitas. Teori kontak Allport dan meta-analisis Pettigrew dan Tropp menunjukkan bahwa kontak antarkelompok yang dikelola dengan baik menurunkan prasangka (Allport, 2006).
4) **Pedagogi kesetaraan (equity pedagogy).** Guru menyesuaikan cara mengajar agar peserta didik dari berbagai latar dapat berhasil secara akademik. Dimensi ini sejalan dengan gagasan culturally responsive teaching dari Gay (Gay, 2010).
5) **Budaya sekolah yang memberdayakan (empowering school culture).** Struktur, kebijakan, dan iklim sekolah dirombak agar inklusif, mulai dari tata tertib, komposisi kepengurusan organisasi siswa, hingga cara sekolah menangani konflik.

d. Perspektif Islam

Bagi PAI, pendidikan multikultural memiliki landasan teologis yang kuat. Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, dan ukuran kemuliaan adalah ketakwaan, bukan identitas kelompok (QS. Al-Hujurat: 13). Prinsip berlaku adil terhadap pihak yang berbeda ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah: 8, sedangkan kebebasan berkeyakinan dalam QS. Al-Baqarah: 256. Konsep *wasathiyah* atau moderasi beragama yang dikembangkan Kementerian Agama mempertegas sikap tengah, adil, dan tidak ekstrem dalam beragama dan bermasyarakat (Kemenag, 2019).

3.2 Polarisasi di Media Sosial

a. Pengertian

Polarisasi adalah proses ketika pandangan atau identitas kelompok dalam masyarakat bergerak ke kutub yang berlawanan, disertai menguatnya rasa curiga, permusuhan, dan pembedaan tajam antara "kami" dan "mereka". Di media sosial, polarisasi tidak hanya berupa perbedaan pendapat, tetapi juga polarisasi afektif, yaitu meningkatnya rasa tidak suka terhadap kelompok lain semata karena identitasnya.

b. Penyebab

Algoritma. Platform menyusun linimasa berdasarkan data perilaku pengguna. Konten yang sering diklik, disukai, atau dikomentari akan lebih sering ditampilkan. Karena konten emosional dan kontroversial menghasilkan interaksi tinggi, ia cenderung mendapat jangkauan lebih luas.

Echo chamber. Sunstein menjelaskan bahwa ketika orang hanya berinteraksi dengan mereka yang sepandangan, pendapat awal justru menguat dan menjadi lebih ekstrem (Cas, 2017). Suara serupa yang saling menggemakan membuat kelompok merasa pandangannya adalah kebenaran umum.

Filter bubble. Pariser memperkenalkan istilah ini untuk menggambarkan personalisasi informasi yang tanpa disadari mengurung pengguna dalam gelembung informasi yang sesuai preferensinya (Pariser, 2011). Berbeda dengan echo chamber, filter bubble dibentuk oleh sistem, sering tanpa sepengetahuan pengguna.

Hoaks dan disinformasi. Wardle dan Derakhshan membedakan tiga jenis gangguan informasi: misinformation (salah tetapi tanpa niat menipu), disinformation (salah dan sengaja menipu), dan malinformation (benar tetapi digunakan untuk merugikan) (Wadle & Derakhsan, 2017). Ketiganya kerap dipakai untuk menyulut sentimen identitas, terutama menjelang momentum politik.

Perlu dicatat bahwa penelitian tidak seluruhnya sepakat bahwa sekadar terpapar pandangan berbeda akan meredakan polarisasi. Bail dkk. justru menemukan bahwa pengguna Twitter yang dipaparkan pada akun berpandangan berlawanan dapat semakin menguat pandangannya (Bail, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya akses informasi, tetapi juga cara mengolahnya, dan di titik inilah pendidikan berperan.

c. Bentuk-bentuk polarisasi

1) **Ujaran kebencian,** yaitu pernyataan yang menyerang atau merendahkan individu atau kelompok berdasarkan identitas seperti suku, agama, ras, atau antargolongan. Di Indonesia, hal ini berkaitan dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
2) **Stereotip SARA,** yaitu generalisasi berlebihan, misalnya melabeli seluruh anggota suatu kelompok dengan sifat negatif berdasarkan ulah segelintir orang.
3) **Perundungan siber (cyberbullying),** yaitu pelecehan, penghinaan, atau intimidasi berulang melalui platform digital yang sering diperparah oleh anonimitas dan efek piling on dari banyak akun.
4) **Politik identitas yang dikomodifikasi,** yaitu sentimen kelompok yang dieksploitasi demi keuntungan politik atau ekonomi, misalnya konten pemancing kemarahan yang dibuat demi jumlah tayangan.

3.3 Dampak pada Peserta Didik

a. Terhadap sikap toleransi

Paparan berulang pada konten yang membingkai kelompok lain sebagai ancaman dapat menumbuhkan prasangka, rasa curiga, dan menurunnya empati. Dalam istilah Banks, hal ini bertentangan langsung dengan dimensi pengurangan prasangka. Toleransi yang dibangun di

kelas selama berminggu-minggu dapat tergerus oleh satu rangkaian video provokatif yang ditonton dalam semalam.

b. Terhadap cara memandang kelompok lain

Media sosial cenderung menyajikan kelompok lain lewat "potongan terburuk", yakni insiden paling viral atau pernyataan paling ekstrem. Akibatnya, peserta didik membentuk gambaran yang sempit dan bias. Pengalaman langsung yang beragam tersisih oleh representasi digital yang sudah tersaring.

c. Terhadap interaksi di kelas

Pola komunikasi digital sering terbawa ke ruang nyata. Gejalanya antara lain kecenderungan membentuk kelompok pertemanan berdasarkan kesamaan identitas atau pandangan, sikap defensif atau menyerang ketika membahas isu sensitif, kesulitan menerima perbedaan pendapat tanpa merasa terancam, munculnya candaan bernuansa SARA yang dianggap "biasa" karena lazim di dunia maya, dan perundungan yang berlanjut dari grup percakapan ke kehidupan sekolah atau kampus.

d. Kekhususan Generasi Z

Generasi Z tumbuh sebagai digital native. Mereka terampil secara teknis, tetapi keterampilan teknis tidak otomatis berarti kemampuan kritis. Mereka juga berada pada fase pembentukan identitas sehingga sangat sensitif terhadap penerimaan kelompok sebaya, dan hal ini membuat tekanan untuk ikut "berpihak" menjadi kuat. Di sisi lain, generasi ini menunjukkan potensi positif berupa kepedulian pada isu keadilan, kemampuan berkolaborasi daring, dan kreativitas menyuarakan gagasan. Potensi ini perlu diarahkan, bukan dibungkam.

3.4 Peran Pendidikan Multikultural sebagai Penyeimbang

Sekolah dan kampus tidak dapat bersaing dengan platform dalam hal kecepatan atau daya tarik, tetapi dapat menawarkan hal yang tidak dimiliki algoritma: pertemuan tatap muka, bimbingan, dan ruang aman untuk berbeda pendapat. Strategi berikut dipetakan pada lima dimensi Banks sebagaimana diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Dimensi Banks terhadap Persoalan Polarisasi Digital

Dimensi Banks	Penerapan di Era Digital	Persoalan Polarisasi yang Dijawab
Integrasi isi	Studi kasus konten viral dan hoaks SARA sebagai bahan ajar; Piagam Madinah dan keragaman mazhab dalam PAI	Stereotip SARA dan pandangan sempit terhadap kelompok lain
Konstruksi pengetahuan	Analisis bingkai (framing), lateral reading, dan pelacakan sumber informasi	Hoaks, filter bubble, dan echo chamber
Pengurangan prasangka	Proyek kolaboratif lintas identitas dan dialog antarkelompok yang terstruktur	Ujaran kebencian dan polarisasi afektif
Pedagogi kesetaraan	Pembelajaran yang memperhatikan kesenjangan akses dan kemampuan digital	Kesenjangan literasi digital
Budaya sekolah yang memberdayakan	Kebijakan antiperundungan siber, kanal pelaporan aman, dan kepemimpinan siswa yang beragam	Perundungan siber dan iklim kelas yang eksklusif

a. Literasi digital

Literasi digital mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara bertanggung jawab. Wineburg dan McGrew menemukan bahwa pemeriksa fakta profesional menilai kredibilitas sumber dengan lateral reading, yaitu keluar dari halaman yang dinilai dan mencari tahu siapa yang berada di baliknya (Wineburg & McGrew). Peserta didik dapat dilatih dengan cara serupa. Prinsip ini selaras dengan perintah *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat: 6, yakni memeriksa kebenaran kabar sebelum bertindak.

b. Berpikir kritis

Berpikir kritis berkaitan dengan dimensi konstruksi pengetahuan. Peserta didik diajak bertanya: siapa yang membuat konten ini, untuk tujuan apa, siapa yang diuntungkan, dan suara siapa yang tidak muncul. Latihan membedah bingkai (framing) pemberitaan atau konten viral membantu mereka menyadari bahwa informasi selalu dibuat dari posisi tertentu.

c. Dialog lintas kelompok

Menurut teori kontak, interaksi antarkelompok efektif menurunkan prasangka bila terpenuhi kondisi tertentu, yaitu status setara, tujuan bersama, kerja sama, dan dukungan otoritas. Bentuk praktisnya meliputi proyek kolaboratif lintas kelompok, kunjungan antarlembaga atau rumah ibadah, program pertukaran pelajar, dan forum dialog antarumat beragama yang difasilitasi.

d. Integrasi nilai keberagaman dalam pembelajaran

Nilai keberagaman tidak berdiri sebagai mata pelajaran terpisah, melainkan diintegrasikan lintas mata pelajaran dan mata kuliah. Dalam PAI, materi fikih dapat memperkenalkan keragaman mazhab sebagai kekayaan ijtihad, materi sejarah dapat membahas Piagam Madinah, dan materi akhlak dapat mengaitkan adab bermedia dengan etika berkomentar. Pembelajaran berbasis proyek dapat meminta peserta didik menganalisis kasus hoaks bernuansa SARA atau membuat kampanye digital yang mempromosikan toleransi.

e. Budaya sekolah dan kampus yang inklusif

Dimensi kelima menuntut perubahan struktural. Institusi perlu memiliki kebijakan antiperundungan, termasuk perundungan siber, mekanisme pelaporan yang aman, serta kepemimpinan organisasi siswa atau mahasiswa yang beragam. Iklim yang inklusif membuat nilai yang diajarkan di kelas juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari kampus.

3.5 Peran Guru dan Dosen

a. Mengelola diskusi isu sensitif

Guru dan dosen adalah aktor kunci. Hess dan McAvoy menekankan pentingnya kelas sebagai ruang deliberasi terbuka untuk isu-isu kontroversial (Hess & McAvoy, 2015). Beberapa praktik yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut.

1) **Menetapkan kesepakatan diskusi sejak awal,** seperti menyerang argumen bukan pribadi, tidak menggeneralisasi kelompok, dan mendengarkan sebelum menanggapi.
2) **Membingkai isu sebagai pertanyaan terbuka,** bukan pertanyaan yang menuntut peserta didik memilih kubu.
3) **Menyajikan sumber dari beragam perspektif** agar peserta didik melihat lebih dari satu sisi.
4) **Mengatur peran,** misalnya meminta peserta didik menyampaikan argumen dari sudut pandang yang berbeda dari keyakinannya untuk melatih empati.
5) **Bersikap adil dan transparan terhadap posisi pribadi.** Pendidik tidak harus menyembunyikan nilai yang dianutnya, tetapi harus menghindari memaksakan pandangan dan menghormati perbedaan.

6) **Menangani ujaran diskriminatif dengan tegas namun mendidik,** yaitu menegur pernyataan yang merendahkan tanpa mempermalukan pelakunya di depan umum, lalu menindaklanjutinya dengan percakapan reflektif.

b. Membantu peserta didik memilah informasi

Pendidik dapat menjadikan konten viral sebagai bahan ajar: menganalisis satu unggahan bersama-sama, menelusuri sumber aslinya, memeriksa konteksnya, menggunakan pencarian gambar terbalik, dan membandingkannya dengan laporan media kredibel. Model ini lebih efektif daripada ceramah tentang "bahaya hoaks" karena melatih kebiasaan, bukan sekadar pengetahuan.

c. Menjadi teladan

Perilaku pendidik di media sosial, seperti cara berkomentar, membagikan informasi, dan menyikapi perbedaan, merupakan kurikulum tersembunyi. Keteladanan dalam bermedia sering lebih membekas daripada materi formal.

3.6 Tantangan dan Hambatan

Kesenjangan literasi digital. Akses perangkat dan internet yang tidak merata, baik antarwilayah maupun antarkelompok sosial, membuat kemampuan peserta didik tidak seragam. Program yang mengandaikan semua peserta didik memiliki akses dan kemampuan setara berisiko memperlebar kesenjangan, dan ini bertentangan dengan prinsip pedagogi kesetaraan.

Kesiapan guru dan dosen. Tidak semua pendidik memiliki pelatihan tentang literasi media, pengelolaan isu sensitif, atau pedagogi multikultural. Sebagian merasa canggung atau takut dianggap berpihak sehingga memilih menghindari topik-topik tersebut.

Kurikulum yang belum menyentuh isu digital secara mendalam. Meskipun nilai kebinekaan sudah tercantum dalam kebijakan, integrasinya pada persoalan konkret dunia digital, seperti algoritma, disinformasi, dan etika bermedia, sering masih bersifat sisipan dan belum sistematis.

Pengaruh media sosial yang lebih kuat daripada sekolah. Waktu yang dihabiskan peserta didik di platform jauh melampaui waktu di kelas. Konten digital dirancang untuk memikat secara emosional, sementara pembelajaran formal sering dipersepsi membosankan. Sekolah tidak bisa menang dengan cara melarang; ia perlu menjadi tempat menafsirkan apa yang dikonsumsi peserta didik di luar kelas.

Tekanan sosial dan politik. Isu SARA yang sensitif kadang membuat institusi berhati-hati berlebihan sehingga pembahasan kritis dihindari demi menjaga "keamanan".

3.7 Rekomendasi

a. Strategi praktis

1) **Integrasikan literasi digital ke dalam mata pelajaran dan mata kuliah,** terutama PAI dan PKn, melalui tugas analisis konten viral, latihan lateral reading, dan verifikasi berbasis prinsip tabayyun.
2) **Selenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan dosen** tentang pedagogi multikultural, fasilitasi diskusi isu sensitif, dan literasi media, termasuk melalui komunitas belajar antarpendidik.
3) **Rancang proyek kolaborasi lintas identitas,** seperti kerja kelompok yang sengaja dibuat heterogen dan proyek pengabdian bersama yang menyatukan peserta didik dari berbagai latar.
4) **Bangun kebijakan antiperundungan siber** yang jelas, dengan jalur pelaporan yang aman dan pendekatan restoratif, bukan sekadar hukuman.

5) **Manfaatkan media sosial sebagai medium belajar,** misalnya melalui proyek pembuatan konten kontra-narasi, kampanye moderasi beragama, dan video edukasi buatan peserta didik.
6) **Libatkan orang tua dan komunitas** agar pembiasaan literasi bermedia tidak berhenti di gerbang sekolah.
7) **Kembangkan modul PAI berbasis moderasi beragama dan etika digital** yang menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dengan situasi bermedia sosial masa kini.

b. Arah penelitian berikutnya

1) **Studi empiris** tentang hubungan antara intensitas dan pola penggunaan media sosial dengan sikap toleransi peserta didik pada jenjang dan wilayah tertentu.
2) **Penelitian dan pengembangan (R&D)** modul literasi digital berbasis multikultural beserta uji efektivitasnya, misalnya melalui desain kuasi-eksperimen.
3) **Studi kualitatif** tentang pengalaman guru dan dosen PAI dalam mengelola diskusi isu sensitif dan tantangan yang mereka hadapi.
4) **Kajian komparatif** antarlembaga (sekolah umum, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi) mengenai praktik pendidikan multikultural di era digital.
5) **Penelitian tentang intervensi berbasis algoritma dan kebijakan platform** serta implikasinya bagi pendidikan.

4. CONCLUSION

Polarisasi media sosial bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan persoalan pendidikan. Kolom komentar telah menjadi "kelas bayangan" yang membentuk cara pandang peserta didik terhadap perbedaan, sering tanpa bimbingan. Pendidikan multikultural menawarkan jawaban yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga membangun, yakni menumbuhkan kemampuan memilah informasi, berpikir kritis, berdialog dengan yang berbeda, dan bertindak adil.

Kelima dimensi Banks, yakni integrasi isi, konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi kesetaraan, dan budaya sekolah yang memberdayakan, tetap relevan asalkan diperluas untuk menjangkau realitas digital. Keberhasilannya bergantung pada kesiapan guru dan dosen, konsistensi pelaksanaan, dan dukungan kebijakan institusi, serta harus memperhatikan kesenjangan literasi digital agar tidak menambah ketimpangan.

Bagi calon pendidik PAI, tugas ini sejalan dengan misi menghadirkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, yakni agama yang menumbuhkan kedamaian, menghargai keragaman, dan menjunjung kebenaran informasi. Pada akhirnya, ruang kelas yang dikelola dengan baik dapat menjadi tempat peserta didik belajar bahwa perbedaan tidak harus berujung pada permusuhan, baik di kolom komentar maupun di kehidupan nyata.

REFERENCES

Allport, G. W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Cambridge, MA: Addison-Wesley.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII, 2024.

Bail, C. A., et al. (2018). "Exposure to Opposing Views on Social Media Can Increase Political Polarization." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115, no. 37, 9216–9221.

Banks, J. A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Edisi ke-4. Boston: Pearson.

Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Edisi ke-6. New York: Routledge.

Gay, G. (2010). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice*. Edisi ke-2. New York: Teachers College Press.

Hess, D. E., dan McAvoy, P. (2015). *The Political Classroom: Evidence and Ethics in Democratic Education*. New York: Routledge.

Kementerian Agama Republik Indonesia.(2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press.

Pettigrew, T. F., dan Linda R. T. (2006). "A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory." *Journal of Personality and Social Psychology* 90, no. 5, 751–783.

Sunstein, C. R. (2017). *Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press.

Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Vosoughi, S., Deb R., dan Sinan A. (2018). "The Spread of True and False News Online." *Science* 359, no. 6380, 1146–1151.

Wardle, C., dan Hossein D. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Strasbourg: Council of Europe.

Wineburg, S., dan McGrew, S. (2019). "Lateral Reading and the Nature of Expertise: Reading Less and Learning More When Evaluating Digital Information." *Teachers College Record* 121, no. 1, 1–40.